



T E S I S

**KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN HUKUM
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

***CONSTITUTIONALITY OF LEGAL STANDING
OF NON GOVERNMENT ORGANIZATION
AS A LEGAL PRIVATE ENTITY
IN CASE OF
THE ACT REVIEW ON THE 1945 CONSTITUTION
AT THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Oleh :

**IRMA SAHVITRI LAWADO, S.H
NIM. 050720101007**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2013**

T E S I S

**KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN HUKUM
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

***CONSTITUTIONALITY OF LEGAL STANDING
OF NON GOVERNMENT ORGANIZATION
AS A LEGAL PRIVATE ENTITY
IN CASE OF
THE ACT REVIEW ON THE 1945 CONSTITUTION
AT THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Oleh :

**IRMA SAHVITRI LAWADO, S.H
NIM. 050720101007**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2013**

T E S I S

**KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN HUKUM
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

***CONSTITUTIONALITY OF LEGAL STANDING
OF NON GOVERNMENT ORGANIZATION
AS A LEGAL PRIVATE ENTITY
IN CASE OF
THE ACT REVIEW ON THE 1945 CONSTITUTION
AT THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pasca sarjana
Universitas Jember**

Oleh :

**IRMA SAHVITRI LAWADO, S.H
NIM. 050720101007**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

J E M B E R

Tanggal : 25 September 2013

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL : 25 September 2013**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H,M.Hum
NIP. 197105111993031001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H,M.H
NIP.198010262008122001**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H,M.Hum
NIP. 197105111993031001**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H,M.H
NIP. 194804281985032001**

**KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN HUKUM
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI
BADAN HUKUM PRIVAT DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

***CONSTITUTIONALITY OF LEGAL STANDING OF NON GOVERNMENT
ORGANIZATION AS A LEGAL PRIVATE ENTITY IN CASE OF
THE ACT REVIEW ON THE 1945 CONSTITUTION
AT THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal : 25 September 2013

SUSUNAN TIM PENGUJI,

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H,M.Hum
NIP. 194310241966091001

(Ketua)

Dr. Djayus, S.H,M.Hum
NIP. 195612061983031003

(Sekretaris)

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H,M.Hum
NIP. 1971050111993031001

(Anggota)

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H,M.H
NIP. 198010262008122001

(Anggota)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Jember

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H,M.H
NIP. 194804281985032001

ABSTRAKSI

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pemberdayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Pengetahuan masyarakat terhadap konkretisasi hukum melalui kajian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan alternatif yang sangat penting dalam rangka memberikan pemahaman terhadap fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam mengemban tugas dan amanahnya untuk mewujudkan Undang-undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang benar-benar hidup (*living constitution*) di tengah-tengah masyarakat serta hak-hak konstitusional masyarakat yang dirugikan atas keberadaan sebuah undang-undang. Diantara banyaknya perkara yang diajukan oleh pemohon yang mengkualifikasikan diri sebagai badan hukum privat, banyak sekali perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang diajukan oleh organisasi masyarakat yang menamakan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Dan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dapat terlihat bagaimana *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam merumuskan putusannya khususnya yang menyatakan N.O (*niet ontvakerlijke verklaard*) dimana dapat dilihat bahwa betapa krusialnya masalah pemenuhan *legal standing* bagi pemohon, sebagai hal yang mendasari pembenaran untuk pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Melalui permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu :

1. Bagaimana *legal standing* Lembaga Swadaya Masyarakat diatur dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana inkonsistensi penilaian atas *legal standing* Lembaga Swadaya Masyarakat oleh Mahkamah Konstitusi dapat terjadi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 ?

Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum acara pengujian undang-undang masih belum diatur tentang *legal standing* bagi Lembaga Swadaya Masyarakat terbukti dalam perkara yang diajukan oleh pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengkualifikasikan diri sebagai badan hukum privat, menunjukkan suatu kecenderungan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memperketat kriteria dalam menilai dan mempertimbangkan atas kualifikasi ini secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut dimana dinyatakan bahwa *in casu* pemohon tetap dinyatakan mempunyai *legal standing* walaupun kualifikasi tentang formalitas selaku badan hukum privat sebagaimana yang didalilkan tidak dapat dipenuhi dan Mahkamah memberikan alternatif lain atas penilaiannya terhadap kualifikasi tersebut dengan mengalihkan kedudukannya kepada pemenuhan kriteria pemohon sebagai individu maupun kelompok perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, “hanya” dengan mendasarkan

pertimbangannya kepada keberadaan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi saja; yaitu apabila tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum yang bergerak dibidang *public interest advocacy*, kecuali apabila bentuk badan hukum yang dipilih oleh suatu Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut adalah berbentuk yayasan.

Oleh karena mengingat bahwa hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat terus bertumbuh dan berubah secara dinamis (*continually evolving*) dan mengingat pula ukuran nilai akan forum dan waktu yang dipakai untuk persidangan Mahkamah Konstitusi terlalu tinggi dan mahal, jika hanya untuk memutuskan suatu pemohon memenuhi syarat atau tidak untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, maka agar in-efisien peran peradilan di tingkat Mahkamah Konstitusi tidak sampai terjadi dan nilai-nilai konstitusionalitas atas prinsip-prinsip hukum, keadilan dan kepastian dalam hukum acaranya dapat tetap terjaga, maka perlu kiranya agar bisa dilakukan perbaikan terhadap hukum acara pengujian undang-undang dengan diadopsinya mekanisme *Dismissal procedure* pada tahap awal pemeriksaan perkara dengan lebih memperketat kriteria bagi pemohon badan hukum privat agar tunduk kepada peraturan yang melegalkan dirinya untuk bertindak sebagai subyek hukum sehingga peradilan konstitusi benar-benar dapat dimanfaatkan bagi pihak yang bersungguh-sungguh membawa masalah konstitusi secara relevan sebagai masalah hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

Kata kunci : legal standing dalam hukum acara pengujian undang-undang, badan hukum privat, lembaga swadaya masyarakat.

ABSTRACT

One of important aspects tends to law enforcement, those are empowering law socialization and law education. The knowledge of people to realizing of law which are studying law decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia that is becoming important. Alternatives in supposing to build understanding for function and the role of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, in its duties and works to realize how to make the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia become to living constitutions.

Among that the law problems or cases that is proposed by anyone that qualified as a legal private entity, in reality found circumstances of verification in some regulations to The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that was proposed by people's organization which is called Non Government Organization (NGO). And through several decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, could be felt how far of *Ratio Decidendi* or considerations of judge in formulating of decisions especially which decide *Niet Ontvankelijke Verklaring* (N.O) that by the decision could be felt how crucial the problems of fulfillment for Legal Standing to proposer that become as basic to purification of proposal qualification for regulate to The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia.

Becoming the view of interest of this thesis are :

1. How the legal standing of NGO's is regulated in constructed law to verify the law in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia ?
2. How the inconsistency of evaluating to Legal standing of NGO's by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia could be happened in the circumstances of laws to The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia?

From those problems could be known that constructed law haven't been regulated about legal standing of NGO's , it could be proved in law circumstances that is proposed by NGO's of that has claimed as a legal private entity. Those show the tends of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia untied criterias in evaluating and considerate to the qualification formally based on laws that currently to NGO's which is decided that is *in casu* of proposer still marked has legal standing although the qualification in formal position as a legal private entity is formulated can't be fulfilled and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia gives other alternatives to valuing for qualification by overview the occupation to fulfilling of proposer's criterias as an Individual or Group that have in the same interest , "just" based on their consideration of the only existence of household budget and main budget of organization (AD-ART), that is if purposes of NGO's really tends to empower public interest that moves in public interest advocacy, except if NGO's form that is chosen as a Foundation.

Because constructed law that is used in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia that be hoped can grow and change dynamic (continually evolving)

and because durations and forum value measurement is too high and expensive and because it's was just as prerequisite to the proposer in the the Constitutional Court of the Republic of Indonesia so in order that's more effective and efficient in the role of court in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia level and it's can be picked up constitutionally to the principles of law, judgement and surement of law construction can be guarded, so need to do something to enlight law construction of constitution by adapting mechanism of "Dismissal Procedure" in the first step of observation with strengthening criterias the proposer of a legal private entity in order obey to regulation that legalization to act as law subjects that constitution justice is really usefull to anyone who seriously thing about law affairs that relevan for problems of constitution rights which is regulated by The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia.

Keywords : legal standing in the law of the act review, a legal private entity, non government organization

